SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah
https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri
Email: sentri@nusantaraglobal.ac.id
DOI: https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5810

Vol. 5, No. 2, February 2026
e-ISSN: 2963-1130
pp. 2209-2222

Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial bagi Anak Jalanan di Kota Samarinda

Trisna Waty Riza Eryani[1*], Konita Turaina[2], Firdayanti Ayu Nurunda[1], Ahmad Yani[1], Abdul Rofik[1], Muhammad Habibi[1]
[1]Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Samarinda, Indonesia
[2]Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Palembang, Palembang, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: trisna@uwgm.ac.id

Article History:
Received: January 27, 2026
Revised: February 26, 2026
Accepted: February 28, 2026

Keywords:
Efektivitas; Program Rehabilitas Sosial; Anak Jalanan; Kota Samarinda

Abstract: *Street children are children aged 5–18 years who spend a significant portion of their time in public spaces, particularly on the streets. Samarinda, as the capital of East Kalimantan Province, continues to face complex social problems related to the presence of street children despite the existence of regulatory measures. Samarinda City Regional Regulation Number 7 of 2017 prohibits people from giving money to beggars, street children, and homeless individuals in public places. However, in practice, street children are still frequently found, especially at traffic intersections. This condition is influenced by several factors, including family economic pressure, limited rehabilitation facilities or shelters, and the influence of the street environment that encourages children to remain involved in street activities. This study aims to analyze the effectiveness of the social rehabilitation program implemented by the Samarinda City Office of Social Affairs and Community Empowerment in improving the behavior and living conditions of street children. This research employed a qualitative method with an exploratory approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the interactive data analysis model proposed by Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. The results show that the social rehabilitation program for street children in Samarinda is relatively effective. A total of 28 street children participated in vocational skills training such as welding, beauty services, cooking, and baking. These activities help change the mindset of street children and encourage them to engage in more productive activities. However, the program still faces several obstacles, including limited rehabilitation facilities, family economic pressure, and the influence of the street environment that often encourages children to return to street life.*

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

How to cite: Eryani, T. W. R., Turaina, K., Nurunda, F. A., Yani, A., Rofik, A., & Habibi, M. (2026). Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial bagi Anak Jalanan di Kota Samarinda. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *5*(2), 2209–2222. https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5810

PENDAHULUAN

Masalah anak jalanan adalah fenomena yang sudah lama berkembang, terutama di kota-kota besar. Pada dasarnya yang belum menikmati hak asasinya dengan wajar masih banyak sehingga kesejaheraan anak kurang terjamin, seperti pendidikan, kesehatan, pembinaan serta perawatan.

UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 "Fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara". Artinya pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan[1]. UU Nomor 1 tahun 2000

tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan tentang penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah mengatur bagaimana interaksi keluarga, lingkungan, dan pemerintah terhadap anak[2].

Anak jalanan atau yang biasa disebut Anjal merupakan anak yang memiliki usia 5 - 18 tahun, biasanya mereka bekerja sebagai; pengamen, jualan koran, pedagang asongan, jasa semir sepatu dan mengelap mobil, yang kesehariannya berada di jalan. Adapun ciri anak jalanan adalah mencari uang membantu orang tuanya, putus sekolah atau tidak sekolah, keluarga yang tidak mampu, broken home, bahkan melarikan diri dari orang tua dan hidup di jalanan, baik sendiri maupun dengan teman-temannya, seperti di tortoar, terminal, bahkan ada di emperan toko.

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki permasalahan yang cukup kompleks terkait dengan anak jalanan. Keberadaaan mereka seperti di pasar dan jalan-jalan umum yang menjadi pusat aktivitas sosial kerap menjadi masalah sosial dan juga dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan, pada Pasal 14 menegaskan bahwa setiap orang dilarang memberi uang kepada pengemis, anak jalanan dan gelandangan dimuka umum baik di jalan, taman dan tempat-tempat lain dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain[3].

Berdasarkan Profil dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda[4], jumlah anak jalanan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah anak jalanan

No	Tahun	Jumlah Anak Jalanan
1	2019	206
2	2020	220
3	2021	233
4	2022	233
5	2023	220
6	2024	210
7	2025	200

Sumber : Profil Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda 2025

Data tersebut belum termasuk anak jalanan yang berhasil menghindari razia. Meskipun ada penurunan jumlah anak jalanan di tahun 2024 dan 2025, namun belum signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan anak jalanan masih menjadi isu sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Kemiskinan menjadi faktor utama yang mendorong anak-anak ke jalanan. Angka kemiskinan di Kota Samarinda meningkat dari 4,31% pada tahun 2011 menjadi 4,81% pada tahun 2023. Badan Pusat Statistik Kota Samarinda memprediksi jumlah penduduk kota ini akan terus bertambah, mencapai 878.405 jiwa pada tahun 2024 dan 884.155 jiwa pada tahun 2025 [5]. Peningkatan ini dipicu oleh migrasi dari daerah lain, khususnya Pulau Jawa dan Sulawesi, yang tertarik dengan prospek lapangan kerja di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Permasalahan ini memicu eksploitasi anak, di mana anak terpaksa hidup di jalanan untuk membantu perekonomian keluarga, ditambah keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki.

Tujuan utama dari program rehabilitasi sosial ini adalah untuk mengurangi jumlah anak jalanan dengan cara memberikan informasi dan keterampilan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka di masa depan, serta menekankan pelatihan moral dan sosial untuk mengubah kebiasaan berpikir negatif yang mungkin dimiliki anak-anak.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda adalah salah satu SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang mempunyai kewenangan memgenai msaalah sosial. Dinas Sosial bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Kepolisian Kota Samarinda telah berupaya dalam menanggulangi anak jalanan dengan cara penertiban. Setelah ditertibkan anak jalanan akan dimasukan ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) milik Pemerintah Daerah. Selama direhabilitasi anak-anak jalanan akan diberikan pembinaan, pendidikan, perawatan kesehatan, serta keterampilan kerja.

Melalui program rehabilitasi ini besar harapan Pemerintah Daerah dan masyarakat agar anak-anak jalanan ini setelah diberikan pendidikan, pelatihan dan keterampilan kerja nantinya mampu bersaing didunia kerja sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki, sehingga tidak ada lagi anak jalanan di Kota Samarinda.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Samarinda dalam mengubah perilaku dan kondisi hidup anak jalanan? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda dalam mengubah perilaku dan kondisi hidup anak jalanan. Adapun urgensi penelitian yaitu mengenai efektivitas program rehabilitasi sosial bagi anak jalanan di Kota Samarinda memiliki urgensi yang sangat tinggi, mengingat anak jalanan menjadi isu sosial dan memerlukan penanganan yang serius. Ada beberapa alasan mengapa penelitian ini penting:

1. Pemahaman yang lebih mendalam; artinya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi anak jalanan di Kota Samarinda, serta penyebab munculnya anak jalanan.
2. Evaluasi program; melalui penelitian, kita dapat mengevaluasi sejauh mana program rehabilitasi yang telah dilaksanakan secara efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu mengembalikan anak jalanan ke kehidupan yang lebih baik.
3. Peningkatan kualitas hidup anak jalanan; dengan memahami efektivitas program rehabilitasi, kita dapat berupaya meningkatkan kualitas hidup anak jalanan dan memberikan mereka kesempatan hidup lebih baik.

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Efektivitas berasal dari kata "*effective"* yang artinya berhasil atau melakukan sesuatu dengan baik. Kemudia efektivitas itu sendiri terdapat beberapa arti penting, yaitu ada efek, mujarab, dan hasil guna.

Benni (2016;69) mengatakan bahwa Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi [6]. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Kemudian Sondang P. Siagian (2016), mengatakan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa yang telah ditetapkan sebelumnya [7].

Efektivitas suatu program rehabilitasi sosial bagi anak jalanan dapat diukur dari sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuannya, yaitu mengembalikan anak jalanan ke kehidupan yang lebih baik dan produktif. Efektivitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari desain program, kualitas pelaksanaan, hingga dukungan lingkungan.

Ada beberapa variabel dalam mengukur efektivitas suatu program menurut Budiani (2007;53), yaitu :

1. Ketetapan sasaran, adalah sasaran sudah ditentukan dan disesuaikan dengan program.
2. Sosialisasi program, adalah program yang sudah dibuat akan disampaikan kepada masyarakat secara umum mengenai pelaksanaan program tersebut.
3. Tujuan program, adalah program yang sudah ada akan dilihat dari hasil pelaksanaannya, apakah sudah tepat atau tidak.
4. Pemantauan program, adalah hasil pelaksanaan program akan dilihat apakah sudah baik atau tidak [8].

B. Rehabilitasi Sosial

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rehabilitasi Sosial merupakan pengembangan atau proses refungsionalisasi seseorang apakah mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat [9].

Menurut Kementerian Sosial RI, rehabilitasi adalah proses pemantapan dan pemulihan kesejahteraan sosial seseorang. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memberikan orang-orang yang berurusan dengan masalah kesejahteraan sosial sumber daya yang mereka perlukan untuk kembali menjadi anggota komunitas dan masyarakat yang produktif pada umumnya.

Suparlan (dalam Nuraini, 2022;110) rehabilitas sosial adalah proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang tersebut dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya dan keluarganya [10].

Rehabilitasi sosial adalah cara yang dilakukan untuk membantu orang lain yang mengalami masalah sosial dalam masyarakat. Cara yang dilakukan adalah meningkatkan penyesuaian diri terhadap keluarga, teman ataupun komunitas. Seperti mereka yang mengalami kesulitan emosional, sosial, maupun fisik di masyarakat.

Adapun tujuan Rehabilitasi Sosial, yakni:

1. Pemulihan: Membantu individu mengatasi masalah sosial, emosional, dan perilaku yang mereka hadapi.
2. Peningkatan Kualitas Hidup: Meningkatkan kualitas hidup individu melalui penyediaan kebutuhan dasar, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.
3. Reintegrasi Sosial: Membantu individu kembali ke masyarakat dan membangun hubungan sosial yang positif.
4. Pencegahan Kembali: Mencegah individu mengalami masalah yang sama di masa depan.

Beberapa aspek-aspek Rehabilitasi Sosial, adalah:

1. Evaluasi: Melakukan penilaian komprehensif terhadap kondisi individu untuk menentukan kebutuhan mereka.
2. Perencanaan: Menyusun rencana rehabilitasi yang individual dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.
3. Intervensi: Melaksanakan berbagai intervensi, seperti konseling, terapi kelompok, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial.
4. Monitoring dan Evaluasi: Memantau kemajuan individu secara berkala dan mengevaluasi efektivitas program.

C. Anak Jalanan

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual [11].

Menurut Kementrian Sosial RI (2001: 23–24), karakteristik anak jalanan terlihat pada ciri-ciri fisik dan psikis, yakni [12]:

1. Ciri Fisik: warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan, kebanyakan berbadan kurus,pakaian tidak terurus.
2. Ciri Psikis meliputi mobilitas tinggi,acuh tak acuh, penuh curiga, sangat sensitif, berwatak keras, sertakreatif.

Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, serta memiliki mobilitas tinggi. Adapun faktor penyebab anak menjadi jalanan, adalah:

1. Kemiskinan: Kemiskinan adalah faktor utama yang mendorong anak-anak ke jalanan.
2. Keluarga bermasalah (*Broken home*): Masalah keluarga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau orang tua yang memiliki masalah narkoba dapat membuat anak-anak merasa tidak aman di rumah.
3. Salah pergaulan
4. Putus sekolah
5. Pengaruh lingkungan

D. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan ialah konteks umum tindakan yang dilakukan Pemerintah sebagai strategi untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dan kemandirian. Tujuan mendasar dalam konsep ini ialah agar masyarakat terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagaimana menurut Subejo dan Supriyanto yang dikutip oleh Bhinadi (2017:23), menurutnya pemberdayaan masyarakat ialah segala bentuk upaya yang secara sengaja memfasilitasi masyarakat regional agar mampu merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki dengan kebersamaan dan berjejaring sehingga masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial yang berskala dan berkelanjutan [13]. Pendapat lain yang memiliki konsentrasi yang serupa juga disampaikan oleh Winarni (dalam Bhinadi, 2017:24) bahwa pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan 3 hal utama yaitu pengembangan, memperkuat potensi atau daya dan lahirnya kemandirian [14]. Artinya tidak ada masyarakat yang tidak memiliki daya upaya melainkan masyarakat yang belum menyadari kemampuannya.

Dari pemahaman tersebut dapat ditarik Kesimpulan bahwa manusia sesungguhnya memiliki kemapuan dan kemauan didalam dirinya, hanya masih tidak mengetahui cara untuk mengembangkan dirinya, dari pemahaman ini maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat agar mandiri, berdaya saing, memiliki kemampuan yang terasah dan memiliki kesadaran bersama-sama untuk mengelola sumberdaya yang ada disekitarnya secara kolektif dan berkesinambungan.

E. Hubungan Konsep

Fenomena anak jalanan merupakan salah satu bentuk patologi sosial yang muncul akibat ketidakseimbangan dalam sistem sosial masyarakat. Menurut Kartini Kartono (dalam Murdianto, 2019;34) bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal [15]. Patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal

Patologi sosial merujuk pada kondisi atau perilaku yang menyimpang dari norma sosial dan mengganggu keteraturan sosial. Dalam konteks anak jalanan, patologi sosial muncul dalam bentuk perilaku seperti mengemis, mengamen, putus sekolah, serta rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Kondisi tersebut sering dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, konflik keluarga, urbanisasi, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan perlindungan sosial.

Anak jalanan sering mengalami disfungsi sosial, yaitu kondisi ketika individu tidak mampu menjalankan peran sosialnya secara wajar dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi sosial yang sistematis untuk memulihkan kondisi tersebut. Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah adalah program rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan dan pengembangan kemampuan individu yang mengalami masalah sosial agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal dalam kehidupan masyarakat. Program rehabilitasi sosial biasanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, pendampingan psikososial, pelatihan keterampilan, serta pembinaan mental dan spiritual. Melalui proses tersebut, anak jalanan diharapkan dapat memperoleh keterampilan hidup serta kesempatan untuk kembali berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat.

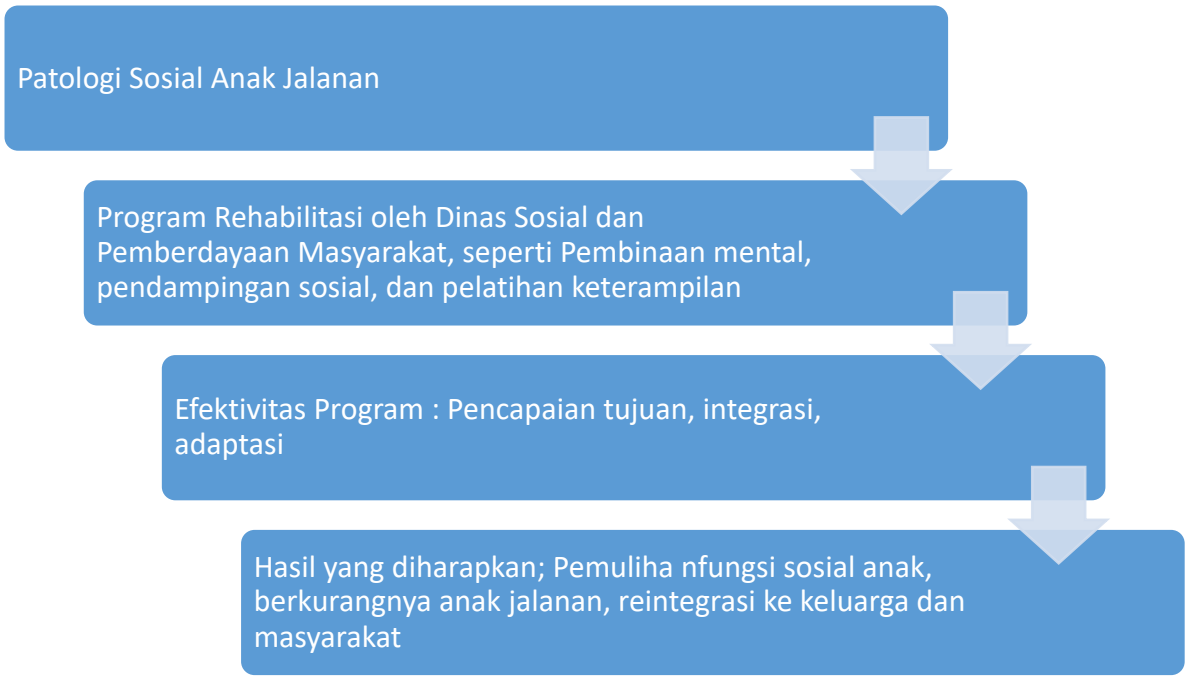
Dalam perspektif sosiologi, rehabilitasi sosial juga dapat dipahami sebagai upaya resosialisasi, yaitu proses pembentukan kembali perilaku individu agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Program rehabilitasi biasanya dilakukan secara bertahap melalui proses asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan pembinaan, hingga reintegrasi sosial. Tahapan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi anak sehingga mereka tidak kembali ke kehidupan jalanan.

Selain itu, rehabilitasi sosial berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang dilakukan oleh negara untuk mengatasi berbagai bentuk patologi sosial. Melalui kebijakan dan program rehabilitasi, pemerintah berupaya mengurangi jumlah anak jalanan serta memperbaiki kondisi kesejahteraan sosial mereka. Dengan demikian, rehabilitasi sosial tidak hanya bersifat kuratif (pemulihan), tetapi juga bersifat preventif untuk mencegah munculnya kembali perilaku menyimpang pada anak jalanan.

Sehingga rehabilitasi sosial merupakan strategi penting dalam mengatasi patologi sosial yang dialami anak jalanan, karena program tersebut berfungsi untuk memulihkan

fungsi sosial individu, memperbaiki perilaku yang menyimpang, serta membantu anak kembali beradaptasi dengan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Gambar 1. Hubungan Konsep



Sumber : diolah peneliti 2025

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian

Burhan Bungin (dalam Ibrahim,2018:52) menyatakan "pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sasarannya terbatas. Semakin dalam berkualitasnya data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut"[16].

Bogdan dan Taylor (dalam Ade Irma Khairani, dkk,2019:1) mengatakan bahwa "Penelitian Kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang proses penelitiannya menghasilkan data Deskriptif dari suatu yang diteliti"[17].

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan bersifat eksploratif atau menggali secara mendalam mengenai efektifitas program rehabilitasi sosial bagi anak jalanan di Kota Samarinda.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Jl. Dahlia No.12, Bugis, Kecamatan Samarinda Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah fokus utama dalam sebuah penelitian. Ini adalah hal spesifik yang ingin kita pelajari, amati, atau ukur. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Ketetapan sasaran, adalah sasaran sudah ditentukan dan disesuaikan dengan program.
2. Sosialisasi program, adalah program yang sudah dibuat akan disampaikan kepada masyarakat secara umum mengenai pelaksanaan program tersebut.
3. Tujuan program, adalah program yang sudah ada akan dilihat dari hasil pelaksanaannya, apakah sudah tepat atau tidak.
4. Evaluasi program, adalah hasil pelaksanaan program akan dilihat apakah sudah baik atau tidak.

D. Sumber Data

1. Data Primer

   adalah suatu sumber data yang diberikan atau didapatkan langsung dari *key* informan dan informan. Sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian, maka penelitian ini mengguakan teknik *purposive sampling*.

   Menurut Sugiyono (2015:149) *Purposive sampling* yaitu peneliti menentukan sendiri sampel dan informasi penelitian yang memiliki kredibilitas memberikan infromasi [18]. Berdasarkan metode *purposive sampling*, maka peneliti menetapkan *key* informan yaitu Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yakni Bapak Drs.H.Isfihani, MM, karena dianggap penting dan paling mengetahui apa yang peneliti harapkan berupa data-data, informasi dan lain sebagainya.

   Sedangkan informan dalam penelitiannya ini adalah :

   a. Bapak Akhmad Yani, S.Sos. selaku Sekretaris Bidang Rehabilitasi Sosial.
   b. Bapak Sony Handayani, S.H. selaku Kepala UPT Panti Sosial Terpadu Sehati.
   c. Dua orang anak jalanan dengan isial HS dan AD.

2. Data Sekunder

   Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah sumber data yang berbentuk fisik seperti dokumen tertulis, surat, majalah, foto kegiatan, dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:305) menyatakan "pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sebagai sumber, berbagai cara [19].

Pada penelitian ini menggunakan observasi langsung , wawancara, dokumentasi, serta dokumen pendukung lainnya.

Dalam penelitian ini, teknik yang peneliti lakukan adalah peneliti membangun *rapport* (hubungan kepercayaan) dengan anak jalanan sebagai informan agar mereka merasa nyaman dalam memberikan informasi. Peneliti melakukan pendekatan awal melalui pendamping sosial atau pihak Dinas Sosial Kota Samarinda sehingga proses komunikasi dengan anak dapat berlangsung lebih aman dan terbuka. Peneliti juga menggunakan bahasa yang sederhana, ramah, dan tidak menghakimi agar anak merasa dihargai serta tidak tertekan selama proses wawancara.

Selain itu, peneliti menyesuaikan waktu dan tempat wawancara dengan kondisi anak serta menciptakan suasana yang santai agar anak dapat menceritakan pengalaman mereka secara lebih terbuka.

Prosedur wawancara juga dilakukan dengan memperhatikan perlindungan hak anak. Proses wawancara dilakukan dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [20]. Peneliti terlebih dahulu meminta persetujuan *(informed consent*) dari informan dan pendamping sebelum wawancara dilakukan.

Selain itu, peneliti menjaga kerahasiaan identitas informan dengan menggunakan nama samaran serta menghindari pertanyaan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan atau trauma bagi anak. Wawancara juga dilakukan di tempat yang aman dan nyaman, seperti rumah singgah atau tempat pembinaan anak jalanan, sehingga hak dan kepentingan terbaik anak tetap terlindungi selama proses penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data menggunakan analisis model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014:8-10) bahwa analisis sebagai tiga arus aktivitas yang bersamaan, yakni :

1. *Data Condensation* (kondensasi data),
2. *Data Display* (tampilan atau sajian data), dan
3. *Drawing and Verifying Conclusions* (menggambarkan dan memverifikasi penarikan simpulan) [21].

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitan

Kota Samarinda terletak disekitaran Kabupaten Kutai Kartanegara. Samarinda juga berjarak sekitar 115 km dengan Kota Balikpapan, kota paling besar kedua di Kalimantan Timur. Kota Samarinda memiliki luas wilayah 718 km² yang terbagi secara administratif menjadi 10 kecamatan, yaitu Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Sungai Pinang. Di dalamnya terdapat 53 desa. Jumlah penduduk di Kota Samarinda mencapai sekitar 928.644 jiwa, dengan 488.583 laki-laki dan 440.061 perempuan. Pertumbuhan penduduknya dapat mencapai 11% pertahun.

Kota Samarinda berada di koordinat 00º 19’ 02” LU hingga 00º 42’ 34” LU dan 117º 03’ 00” BT hingga 117º 18’ 14” BT, yang menunjukkan bahwa kota ini terletak di wilayah khatulistiwa. Salah satu ciri geografis Samarinda adalah terbelahnya kota oleh Sungai Mahakam, sungai terbesar dan terpanjang di Kalimantan Timur. Sungai ini berperan penting sebagai jalur kehidupan masyarakat dan akses menuju pedalaman Kalimantan Timur. Meskipun tidak berbatasan langsung dengan laut, Sungai Mahakam terhubung dengan wilayah pesisir melalui daerah Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur, dan Balikpapan.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda adalah lembaga pemerintahan yang bertugas menangani masalah sosial di masyarakat, dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda. Visi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Menuju Keberdayaan dan Kemandirian PMKS dan PSKS”. Sedangkan Misi dapat dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian PMKS
2. Meningkatkan partisipasi PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan PMKS
4. Menyediakan data dan informasi pembangunan kesejahteraan sosial

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan. Peran Dinas Sosial sangat penting dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat preventif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan ini mencakup pembinaan, sosialisasi, dan pemberdayaan keterampilan, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas individu agar dapat mandiri.

Rehabilitasi di sini merupakan upaya untuk memulihkan kembali fungsi sosial seseorang, dengan misi utama agar individu tersebut tidak terpaksa kembali menjadi pengemis. Dinas Sosial berusaha memberikan pembinaan yang efektif, untuk memastikan mereka dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan baik. Secara makro, rehabilitasi sosial dapat dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial [22], yang mencakup empat aspek utama, yaitu;

1. Pemberdayaan sosial,
2. Rehabilitasi sosial,
3. Perlindungan sosial,
4. Jaminan sosial.

Pemberdayaan sosial berfokus pada penguatan individu dan kelompok yang tidak berdaya agar dapat mandiri, sedangkan rehabilitasi sosial menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan, bagi mereka yang memerlukannya. Lebih jauh, rehabilitasi sosial ditujukan untuk memperbaiki kehidupan individu yang sebelumnya mungkin hidup sebagai gelandangan atau berada dalam kondisi sosial yang sulit. Tujuannya adalah mengubah pola pikir dan cara hidup mereka, sehingga dari kondisi yang kurang menguntungkan, mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan pendekatan ini, diharapkan mereka tidak hanya dapat menghindari pengemis, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri mereka sendiri dan orang lain.

Dinas Sosial berperan aktif dalam memberikan modal atau bantuan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Setelah menerima bantuan tersebut, mereka diharapkan dapat berupaya mandiri dengan membentuk kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dinas Sosial juga melaksanakan pelatihan keterampilan di rumah singgah, bekerja sama dengan pemerintah provinsi, yang mencakup program-program pelatihan seperti mengelas, perawatan salon, memasak, dan membuat kue, yang biasanya diadakan 2-3 kali dalam setahun. Tujuan utama dari program ini adalah mengubah pola pikir pengemis, yang awalnya hanya bergantung pada meminta-minta, menjadi lebih termotivasi untuk bekerja dan memiliki keterampilan.

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan masalah pengemis di Kota Samarinda meliputi beberapa langkah strategis, yang pertama adalah sosialisasi

kepada masyarakat, karena dukungan masyarakat sangat penting untuk perkembangan program. Masyarakat masih bersedia memberikan bantuan kepada pengemis, mengingat hal tersebut sudah menjadi budaya di lingkungan. Selain sosialisasi, juga mengembangkan *shelter* sebagai tempat penampungan sementara bagi pengemis dan melakukan pemulangan bagi mereka yang berasal dari luar Samarinda.

Program tersebut tetap menghadapi berbagai tantangan dalam pembinaan para pengemis, terutama yang berkaitan dengan mental malas, faktor ekonomi, kebutuhan hidup, kurangnya keterampilan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Kelima faktor ini menjadi penghambat dalam memberikan pembinaan yang efektif. Selain itu, banyak pengemis, terutama anak jalanan dan gelandangan, yang antipati terhadap istilah pembinaan. Mereka lebih memilih untuk meminta-minta tanpa berusaha mengembangkan keterampilan kerja, karena cara tersebut dianggap lebih realistis. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Anak Jalanan [23], dimana ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menuntaskan anak jalanan, yaitu:

1. Merehabilitasi kondisi psikologis dan perilaku anak
2. Memberikan pendidikan dan keterampilan
3. Mempersiapkan anak kembali ke masyarakat dan keluarganya secara sehat
4. Menanggulangi kebiasaan negatif

Menurut Nugroho, A. (2022), Program rehabilitasi bagi anak jalanan perlu menyesuaikan dengan karakter mereka yang sering resisten terhadap aturan formal karena pengalaman hidup di jalan yang bebas, kurangnya kepercayaan terhadap institusi, serta latar belakang keluarga dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan yang telah lakukan adalah persuasif dan humanis, bukan pendekatan yang bersifat kaku atau represif [24]. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, yakni:

1. Penjangkauan (*Outreach*)

   Disini petugas sosial turun ke lapangan (pasar, lampu merah, *mall*, dll.) untuk menjumpai anak jalanan. Anak diajak secara sukarela ikut dalam kegiatan pembinaan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara dialog dan komunikasi personal.
2. Rehabilitasi

   Anak dibawa ke tempat pembinaan seperti klinik jalanan, bukan panti milik pemerintah karena Dinsos belum memilikinya sendiri. Di sana mereka diajari membaca, menulis, berhitung (bagi yang buta huruf), mengikuti terapi motivasi dan penyuluhan (terutama untuk yang mengalami trauma atau adiksi), serta mendapat pembelajaran keterampilan hidup sederhana *(life skill)*
3. Pendidikan Non-Formal

   Diberikan belajar paket A, B, C untuk pendidikan formal setara SD, SMP, SMA. Namun, banyak anak merasa program ini kurang bermakna karena sulit mendapatkan pekerjaan hanya bermodal ijazah paket.
4. Pemulangan atau Integrasi Sosial

   Anak yang sudah siap akan dikembalikan ke keluarganya (jika kondusif). Jika tidak memungkinkan, anak akan disalurkan ke yayasan mitra untuk pendampingan lanjutan.
5. Kolaborasi dengan Keluarga dan Lingkungan.

Selain pembinaan individu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Samarinda juga sudah berupaya melibatkan keluarga dan lingkungan sosial. Hal ini penting agar perubahan perilaku anak dapat dipertahankan setelah mereka kembali ke masyarakat. Kolaborasi ini dilakukan dengan cara asesmen terhadap kondisi keluarga anak jalanan, kemudian memberikan pendampingan berupa konseling keluarga, bantuan sosial, serta pembinaan kepada orang tua agar mampu kembali menjalankan fungsi pengasuhan dengan baik.

Menurut Suyanto, B. (2020), Pendekatan persuasif-humanis ini dianggap efektif karena anak jalanan cenderung lebih menerima bimbingan yang dilakukan melalui hubungan kepercayaan, empati, dan partisipasi, dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat otoriter [25].

Program rehabilitasi yang sudah di lakukan oleh Dinas Sosial dan pemberdayaan Kota Samarinda akan selalu di evaluasi terkait pelaksanaannya. Dari hasil evaluasi dilihat bahwa beberapa anak jalanan yang dulunya kecanduan lem kini sudah tidak lagi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan perilaku, mulai dari bisa membaca dan menulis, bahkan menunjukkan keinginan kembali bersekolah. Pendekatan lembut dan bersahabat membuat anak lebih terbuka menerima bimbingan. Sinergi antara pemerintah, yayasan, dan masyarakat memberikan pengaruh positif. Namun program rehabilitasi ini akan tetap memiliki kendala, yakni Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda ini tidak memiliki panti sendiri, hanya mengandalkan mitra, yang menyebabkan keterbatasan ruang dan pengawasan. Keterbatasan dana dan tenaga kerja sosial menyebabkan cakupan program terbatas, tidak bisa menyasar seluruh anak jalanan. Serta *mindset* masyarakat yang masih memberi uang kepada anak jalanan, membuat mereka kembali ke jalan meski sudah direhabilitasi.

KESIMPULAN

Program rehabilitasi sosial anak jalanan di Samarinda yang dijalankan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda tergolong cukup efektif dalam pendekatan dan niat, namun masih memiliki banyak keterbatasan teknis dan struktural. Perubahan besar masih dibutuhkan, terutama dalam hal: infrastruktur yang memadai, pendanaan berkelanjutan, SDM berkualitas, dan kesadaran masyarakat. Dengan penguatan dalam aspek-aspek tersebut, program ini bisa menjadi lebih sistematis, menyeluruh, dan berdampak jangka panjang. Efektivitas program menunjukkan capaian yang belum signifikan dalam hal: tingkat kecanduan lem, minat belajar anak, serta masih kurangnya kepedulian masyarakat melalui pelibatan komunitas. Ada beberapa kendala yang dihadapi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Samarinda, salah satunya belum memiliki panti atau rumah singgah sendiri, sehingga seluruh proses rehabilitasi bergantung pada lembaga mitra. Keterbatasan anggaran dan tenaga kerja sosial menjadi kendala utama dalam menjangkau seluruh anak jalanan di Kota Samarinda.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya tergantung pada pendekatan lapangan, tetapi juga sangat bergantung pada kebijakan struktural yang menyokong. Rehabilitasi sosial harus dilihat sebagai program jangka panjang, bukan sekadar penanganan situasional. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang lebih matang, penguatan koordinasi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas institusi pelaksana.

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan:

1. Sinkronisasi Penegakan Peraturan dan Program Sosial.

   Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Sosial Kota Samarinda perlu melakukan sinkronisasi antara penegakan sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Ketertiban Umum yang melarang masyarakat memberikan uang kepada anak jalanan dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga. Penegakan sanksi tersebut harus diimbangi dengan program penyediaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan bantuan usaha bagi orang tua anak jalanan agar faktor ekonomi yang mendorong anak turun ke jalan dapat diminimalisir.
2. Penguatan Rehabilitasi Berbasis Keluarga

   Program rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pembinaan individu anak di rumah singgah, tetapi juga perlu diperkuat melalui pendekatan rehabilitasi berbasis keluarga. Hal ini dapat dilakukan melalui konseling keluarga, pendampingan sosial, serta pemberian bantuan sosial kepada keluarga agar mereka mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal.
3. Kolaborasi Antar Instansi

   Penanganan anak jalanan memerlukan kerja sama lintas sektor antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan anak jalanan mendapatkan akses pendidikan kembali, sementara orang tua mereka memperoleh pelatihan kerja atau kesempatan kerja yang layak.
4. Peningkatan Program Pembinaan dan Keterampilan Anak

   Program rehabilitasi sosial perlu dilengkapi dengan pelatihan keterampilan praktis seperti pelatihan kewirausahaan, kerajinan, atau keterampilan kerja lainnya. Tujuannya agar anak memiliki bekal kemandirian sehingga tidak kembali ke kehidupan jalanan.
5. Peningkatan Edukasi kepada Masyarakat

   Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak pemberian uang kepada anak jalanan. Edukasi ini penting agar masyarakat lebih mendukung program rehabilitasi sosial dan tidak secara tidak langsung mempertahankan keberadaan anak jalanan di ruang publik.

DAFTAR REFERENSI

[1] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 "Fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara".
[2] Undang-Undang RI No. 1 tahun 2000 tentang Kesejahteraan Anak
[3] Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan
[4] Profil Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
[5] Badan Pusat Statistik Kota Samarinda
[6] Benni Pekkei. 2016. *Manajemen efektivitas*. Penerbit Taushia.
[7] Sondang P Siagian. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
[8] Sugiyono dalam Budiani . 2007. Dalam Jurnal Ekonomi Sosial. Hal 53
[9] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rehabilitasi Sosial
[10] Nur'aini, Miswanto, dan Yeni Marito Harahap. 2022. *Patologi dan Rehabilitasi Sosial*. Jawa Barat: Eureka Media Aksara

[11] Undang-Undang RI No. 23 Pasal 1 Ayat (6) tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (6)
[12] Kementrian Sosial RI Tahun 2001 tentang karakteristik anak jalanan
[13][14] Ardito Bhinadi. 2017. Penanggulangan Kemiskinan dan pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish
[15] Murdianto. 2019. Patologi Sosial Konsep, Teori dan Aplikasi. Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
[16] Ibrahim,M.A. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung *:* Penerbit Alfabeta
[17] Ade Irma Khairani dan Wan Rajib Azhari Manurung. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Case Studi.* Jakarta *:* Cv Trans Info Media
[18][19] Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND.* Bandung *:* Alfabeta
[20] Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
[21]] Mattew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis.* Sage.
[22] Undag-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
[23] Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengalolaan Anak Jalanan
[24] Nugroho, A. (2022). Strategi Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.
[25] Suyanto, B. (2020). Penanganan Anak Jalanan melalui Pendekatan Pemberdayaan Sosial. Jurnal Sosiologi Reflektif.